

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Perangkat Daerah : 2024 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat : Urusan Pemerintahan Umum																				
"Risiko" yang Teridentifikasi										Kejadian Risiko										
No	Program/kegiatan	b	Risiko	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Analisis Risiko Sebelum Pelaksanaan RTP			Analisis Risiko Setelah Pelaksanaan RTP			Keterangan	
													Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko		
1	Risiko Operasional 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			ROO.24.35.03.01	Mei 2024	Keterbatasan kemampuan OPD untuk melaksanakan tindak lanjut	Tindak lanjut tidak sesuai dan/atau belum terindaklanjuti	Tindak lanjut atas temuan audit kinerja pada RSUD Wonosari terkait layanan Hemodialisa	Monitoring tindak lanjut	Januari-Desember	Januari-Desember	Move atas temuan Inspektorat Daerah Gunungkidul, Irda DIY, BPKP, BPK	4	2	13	4	2	13		Tetap
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pengawasan tidak tepat sasaran	ROO.24.35.03.02				Pelaksanaan pendampingan Manajemen Risiko OPD dan Pemerintah Daerah	Peningkatan koordinasi internal	Jun	Jun	Pelaksanaan Asistensi MR dan penyusunan PKPT berbasis risiko	4	3	17	4	2	13		Turun
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO.24.35.03.03	Des 2024	Kekurangan Sumber daya	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan regulir (ketaatan)	Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Januari	Januari	Pemeriksaan mandatoris yang tidak seluruhnya tercantum dalam PKPT	3	3	14	3	3	14		Tetap
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Keterbatasan waktu pelaksanaan pengawasan	ROO.24.35.03.04	Mei 2024	Kekurangan Sumber daya		Pemeriksaan regulir (ketaatan)	Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Januari	Januari	Pemeriksaan mandatoris yang tidak seluruhnya tercantum dalam PKPT	3	3	14	3	3	14		Tetap
5	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kelidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	ROO.24.35.03.05					Monitoring tindak lanjut	Januari-Desember	Januari-Desember	Move atas temuan Inspektorat Daerah Gunungkidul	4	2	13	4	1	8		Turun
6	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	ROO.24.35.03.06					Peningkatan kompetensi secara berkala	Januari-Desember	Januari-Desember	Pakta integritas	5	3	22	5	2	21		Turun
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Pemeriksaan tidak objektif	ROO.24.35.03.07					Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan dalam pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah	Januari-Desember	Januari-Desember	Pakta integritas	5	2	21	5	1	20		Turun
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Keterlambatan Penyusunan laporan	ROO.24.35.03.08					Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Januari	Januari	Audit bekerja sama dengan APH	4	3	17	4	2	13		Turun
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		terjadinya kasus pengul di Lingkungan Pemerintah Daerah	ROO.24.35.03.09					Penguatan WBS, penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan	Januari-Desember	Januari-Desember	Audit bekerja sama dengan APH	4	2	13	4	2	13		Tetap
10	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	ROO.24.35.03.10					Sosialisasi penyusunan Manajemen Risiko	Jun	Jun		4	3	17	4	1	8		Turun
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Penetapan kebijakan teknis tidak tepat waktu	ROO.24.35.03.11					Peningkatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi	Januari-Desember	Januari-Desember		3	3	14	3	2	11		Turun
12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	ROO.24.35.03.12					penyusunan MR update setiap tahun	Jun	Jun	Dalam Proses penyusunan MR	3	3	14	3	2	11		Turun
13	Pendampingan dan Asistensi		Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	ROO.24.35.03.13					Peningkatan koordinasi sebelum pelaksanaan pengawasan	Januari-Desember	Januari-Desember	Penyusunan Template LHP	4	2	13	4	1	8		Turun
14	Pendampingan dan Asistensi		Peningkatan kasus fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.24.35.03.14	Des 2024	Fraud	Merugian Keuangan Daerah		Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jul-Desember	Jul-Desember		4	2	13	4	2	13		Tetap
15	Pendampingan dan Asistensi		Adanya benturan kepentingan dalam pelayanan pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.24.35.03.15					Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jul-Desember	Jul-Desember		4	2	13	4	2	13		Tetap
16	Pendampingan dan Asistensi		Penyalan bukti dukung ZI / WBK / WBSM tidak tepat	ROO.24.35.03.16					Pendampingan ZI WBK untuk OPD terpilih	Mar	Mar		3	3	14	3	2	11		Turun
17	Pendampingan dan Asistensi		belum semua PD melaporkan gratifikasi	ROO.24.35.03.17					Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jul-Desember	Jul-Desember	Januari seluruh OPD telah melaporkan	3	3	14	3	2	11		Turun
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		penatausahaan keuangan tidak akurat	ROO.24.35.03.22					Peningkatan kompetensi pegawai dan proses verifikasi berjenjang	Januari-Desember	Januari-Desember		4	2	13	4	1	8		Turun

